

## **PELAKSANAAN PIDANA DENDE DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG**

(Musyiami Ramadhani, 1320112055, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 113 halaman, 2016)

### **ABSTRAK**

Ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tinggi. Pidana denda tersebut diancamkan mulai dari seratus juta rupiah sampai dengan dua puluh miliar rupiah. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Model pengancaman pidana denda ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terpidana tidak membayar pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Hal tersebut akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus undang-undang dalam mengancam pidana denda pada UU Narkotika. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Lubuk Basung? 2) Apa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung agar pidana denda dalam tindak pidana narkotika dapat dieksekusi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1.) Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, tidak satupun terpidana narkotika yang melaksanakan pidana denda yang diputus hakim. Mereka memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda daripada membayar pidana denda. Ini dikarenakan adanya dua faktor utama yakni keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh para terpidana serta terdapatnya kemungkinan untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang jangka waktunya sangat singkat dan dianggap lebih menguntungkan. 2.) Upaya yang dilakukan oleh Jaksa adalah melakukan penagihan terhadap terpidana. Apabila terpidana tidak mampu membayar maka akan dibuatkan surat keterangan tidak sanggup membayar, sehingga sebagai konsekuensinya terpidana menjalani pidana penjara pengganti denda. Untuk perbaikan dalam penegakan hukum pidana narkotika di masa depan, perlu dilakukan revisi UU Narkotika, dengan tidak mencantumkan ketentuan minimum pidana denda sehingga penuntut umum dan hakim dalam menerapkan pidana denda dapat memberikan jumlah yang rasional untuk dilaksanakan, dan memperberat ketentuan mengenai pidana penjara pengganti denda yang tidak dapat dibayar.

**Kata Kunci: Pidana Denda, Pidana Penjara Pengganti, Tindak Pidana Narkotika.**

## **EXECUTION OF FINES IN NARCOTICS CRIME AT DISTRICT ATTORNEY OF LUBUK BASUNG**

(Musyiami Ramadhani, 1320112055, Magister of Law Andalas University, 113 pages, 2016)

### **ABSTRACT**

The sanction of fines in The Law of Number 35, year 2009 on Narcotics Drugs is very high. The penalty ranging from one hundred million rupiah up to twenty billion. However, the high amount of fine is inversely proportional to substitute fines criminal provisions set out in Article 148 of Narcotics Law namely imprisonment for a period of 2 (two) years. The fine form of criminal punishment is feared will lead the convict to do not pay a fine and prefer substitute convict. This will have implications for the success of the objectives to be achieved by the makers of constitution threatening fines in Narcotics Law. The problems in this thesis are: 1) How is the execution of fines in narcotic crime in District Attorney of Lubuk Basung? 2) What efforts made by District Attorney of Lubuk Basung ensure the narcotics drugs can be executed? The method used in this research is a sociological juridical methods. Type of research is descriptive by using primary data and secondary data. The results showed that 1. At the District Attorney Lubuk Basung, none of the convicted of narcotics that pay fines. They chose to run the substitute convict rather than pay fines. This is due to two main factors namely economic constraints possessed by most of the convict and also many possibilities to replace fines with substitute convict period is very short and is considered more profitable. 2. The effort made by the prosecutor is charging against the convict. If the convicted person can not afford to pay will be given certificate can not afford to pay and consequently the convict to do substitute convict. For improvements in the criminal enforcement of narcotics in the future, the need to revise the Narcotics Law, by not specify minimum requirement of fines so that prosecutors and judges in applying criminal penalties can provide rational number to be implemented, and to aggravate the conditions of the substitute convict can not be paid.

**Keywords: Fines, Substitute Convict, Narcotics Crime.**